

## **OPTIMALISASI PERANAN INDONESIA DALAM KERJASAMA MILITER NEGARA-NEGARA ASEAN GUNA MEMANTAPKAN STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN REGIONAL DALAM RANGKA KETAHANAN NASIONAL**

Alenia keempat UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan agar bangsa Indonesia harus terlibat dalam **melaksanakan ketertiban dunia** yang berdasarkan **kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial**. Hal ini tidak terlepas dari pengalaman sejarah bangsa Indonesia yang pernah mengalami nasib yang sangat menderita, kemudian dapat bangkit dan berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita merasa bangga sebagai bangsa Indonesia dan peduli untuk berjuang mensukseskan pembangunan, baik di dalam negeri maupun dalam kancah politik global.

Terkait dengan hal itu, Indonesia selalu berusaha terlibat aktif dalam proses interaksi dengan negara-negara di dunia. Dengan mengusung tema Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif, Indonesia berupaya memainkan peranannya di dunia Internasional. Situasi dan kondisi politik internasional yang sangat dinamis telah mendorong para pengambil keputusan Indonesia untuk mengikutinya dengan seksama agar Indonesia tetap dapat memainkan perannya secara signifikan.

Dalam perkembangannya, kerjasama militer sesama negara ASEAN juga difokuskan untuk aktivitas-aktivitas non militer, misalnya untuk kemanusiaan, seperti penanggulangan bencana alam yang sering menimpa negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu, bisa juga dilakukan dalam kerangka kepentingan intelijen yang terkait dengan keamanan domestik masing-masing negara. Apalagi beberapa tahun terakhir ini, terorisme telah menjadi isu dan ancaman bersama bagi negara-negara di dunia, termasuk negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Bagi Indonesia, hal ini sangat penting dilakukan mengingat luasnya wilayah negara yang harus dijaga, baik wilayah darat, laut maupun udara. Sehingga, kerjasama militer untuk kepentingan apa pun sangat membantu Indonesia dalam menjaga keutuhan teritorial dan ketangguhan ketahanan nasional. Secara ideologis,

ancaman yang datangnya dari luar juga dapat dicegah melalui kerjasama militer yang dilakukan.

Meskipun berbagai kerjasama militer telah dilakukan, ternyata masih tetap menimbulkan persoalan-persoalan bagi Indonesia, terutama dalam bidang politik dan keamanan. Dalam bidang politik, pengaruh ideologi kapitalis dan liberal yang dianut oleh beberapa negara ASEAN sedikit banyak telah mempengaruhi kondisi politik dalam negeri Indonesia. Nilai-nilai luhur bangsa yang terkandung dalam Pancasila, perlahan-lahan mulai pudar. Gerakan-gerakan politik liberal yang mengatasnamakan demokrasi telah erasuk ke alam pemikiran rakyat Indonesia, yang dalam beberapa hal telah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

Mengingat Pancasila sebagai landasan idiil, kerjasama militer yang dilakukan oleh Indonesia harus mencerminkan semangat nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Dengan dasar itulah, kerjasama militer sesama negara ASEAN dan upaya mengoptimalkan peranan Indonesia di dalamnya, tetap selalu berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Militer Indonesia harus menunjukkan sikap nilai-nilai luhur yang telah berkembang dalam diri bangsa Indonesia. Tentunya, nilai luhur tersebut bukanlah nilai-nilai yang bersifat ekspansionistis seperti yang dapat dilihat dari nilai-nilai militer negara adi daya, seperti kekuatan militer AS. Sebaliknya, Indonesia selalu mengedapnkan nilai-nilai kebersamaan dalam kerjasama militer, tanpa mengurangi kewaspadaan terhadap kepentingan nasional dan ketahanan nasional bangsa Indonesia.

Berbagai upaya untuk mengoptimalkan peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN harus diperuntukkan dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional RI yang tangguh. Oleh karenanya, segala bentuk pola sikap dan pola tindak komponen bangsa, termasuk Tentara Nasional Indonesia (TNI) haruslah selalu mengacu kepada UUD NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional. Dengan demikian, segala sesuatu tindakan yang diambil akan tetap dapat menjaga keutuhan wilayah NKRI.

Dengan berpedoman bahwa wawasan nusantara sebagai landasan visional, maka upaya mengoptimalkan peranan Indonesia dalam kerjasama

militer negara-negara ASEAN guna memantapkan politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional harus selalu mengacu pada konsep tentang Wawasan Nusantara. Dengan cara itulah, bangsa Indonesia akan dapat mewujudkan ketahanan nasional yang tangguh sekali agar cita-cita dan tujuan nasional tetap dapat dicapai.

Sebagai upaya untuk mengoptimalkan peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan politik dan kemaanan kawasan dalam rangka ketahanan nasional ini, maka pengambil keputusan Indonesia harus berpedoman pada ketahanan nasional sebagai landasan konseptualnya. Segala macam tindakan yang akan diambil, hendaklah memperhatikan unsur-unsur ketahanan nasional yang diperuntukkan mencapai cita-cita dan tujuan nasional. Jika ketahanan nasional sebagai landasan konseptual diabaikan, maka ancaman terhadap NKRI juga akan datang pada diri bangsa Indonesia. Oleh karenanya, ketahanan nasional yang tangguh harus dijaga sebagai bagian dari upaya untuk mempertahankan NKRI.

Ada beberapa aturan perundang-undangan yang relevan dengan tulisan ini, yakni, UU RI Nomor : 5 Tahun 1983 tentang ZEE, UU RI Nomor : 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi UNCLOS, UU RI Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, UU RI Nomor : 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, UU RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional, UU RI Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025.

Dalam RPJPN Tahun 2005-2025 telah ditegaskan bahwa **Visi Pembangunan Nasional tahun 2005-2025** adalah **INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR**. Sedangkan misi pembangunan nasional ditetapkan ada 8 (delapan) poin. Khusus yang terkait dengan tulisan ini terdapat pada **poin 4**, yakni **mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu** adalah membangun kekuatan TNI hingga melampaui kekuatan esensial minimum serta disegani di kawasan regional dan internasional, **poin 7**, yaitu **mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional** adalah menumbuhkan

wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan dan **poin 8**, yakni **mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional** adalah memantapkan diplomasi Indonesia dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasional; melanjutkan komitmen Indonesia terhadap pembentukan identitas dan pematapan integrasi internasional dan regional; dan mendorong kerja sama internasional, regional dan bilateral antar masyarakat, antar kelompok, serta antar lembaga di berbagai bidang.

Kerjasama ASEAN juga berkembang sejalan dengan perkembangan isu-isu global. Berakhirnya perang dingin membawa konsekuensi adanya pergeseran kerjasama ASEAN, baik intra ASEAN maupun antara ASEAN dengan mitra dialognya. Selain kerjasama yang bersifat multilateral, di dalam anggota ASEAN juga dijalin kerjasama bilateral dalam berbagai bidang. Kerjasama politik dan keamanan ASEAN meliputi ZOPFAN, TAC, ASEANWFZ dan ARF.

Adapun beberapa kerjasama militer yang telah dilakukan negara-negara ASEAN dan peranan Indonesia adalah sebagai berikut *MALSINDO (Malacca Straits Coordinated Patrol)*, Kerjasama Militer Indonesia – Singapura, *Latgabma Malindo Darsasa (Latihan Gabungan Bersama Malaysia-Indonesia Samudera dan Angkasa)*, *Joint Bilateral Commission Indonesia-Philippines*, Kerjasama Militer Indonesia dan Thailand, Kerjasama militer Indonesia dan Vietnam.

Beberapa implikasi yang dapat dilihat adalah, potensi konflik masalah perbatasan menjadi ancaman laten, terjadi kohesifitas semu di kalangan negara asean, belum semua negara asean menjalin kerjasama militer, belum semua negara tetangga asean menjalin kerjasama militer. Memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dapat memberikan implikasi terhadap ketahanan nasional yang menyangkut aspek trigatra dan panca gatra.

Dalam setiap kerjasama, terdapat beberapa hal yang kadangkala tidak sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Demikian juga halnya dengan peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi, yakni Belum Tuntasnya Batas-batas

Negara Indonesia dengan Negara-Negara Tetangga, Rendahnya Alokasi Anggaran Pertahanan Negara, Belum Stabilitasnya Kondisi Politik Dalam Negeri dan Kurangnya Pemahaman Manajemen Bencana Alam di Kalangan Militer ASEAN.

Mencermati pengaruh lingkungan strategis global, regional dan nasional yang telah dijelaskan terdahulu, terdapat beberapa peluang dan kendala optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan politik dan keamanan dalam rangka ketahanan nasional.

Beberapa peluang diantaranya, *pertama*, Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tuntutan perdagangan bebas dapat mendorong investor asing menanamkan modalnya di Indonesia. *Kedua*, Isu demokratisasi, HAM, lingkungan hidup dan terorisme yang merupakan isu internasional membuat negara-negara ASEAN merasa perlu meningkatkan kerjasama militer diantara mereka. *Ketiga*, Posisi geografis yang strategis dapat memberi peluang kepada Indonesia untuk dipercaya mengelola lalu lintas perdagangan dunia, khususnya lalu lintas laut secara lebih optimal. *Keempat*, Kemajuan Teknologi Informasi memberikan kemudahan akses pencarian informasi dengan cepat dan akurat, sehingga akan memudahkan koordinasi dalam berbagai bentuk kerjasama militer, baik menanggulangi kejahatan trans-nasional maupun kejahatan kemanusiaan lainnya.

Selain peluang, juga ada kendala yang dihadapi, *pertama*, pemerintah Indonesia diliputi ketidakpastian politik. *Kedua*, euforia reformasi 1998 yang salah satunya menuntut reformasi di tubuh TNI, ternyata sudah kehilangan arah. Seharusnya militer tetap ditempatkan sesuai dengan perannya secara proporsional seperti yang terdapat dalam pasal 7 ayat (1) UU Tentara Nasional. *Ketiga*, dengan jangkauan wilayah yang sangat luas dan tidak diimbangi dengan kepemilikan alutsista yang memadai, dapat menyulitkan Indonesia dalam menjalin kerjasama militer. *Keempat*, reformasi Indonesia telah mengesampingkan peranan industri strategis yang pernah berjaya pada masa lalu.

Adapun optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN yang diharapkan berupa :

- a. Meningkatkan frekuensi patroli di daerah perbatasan, dengan cara menambah kekuatan, baik kualitas maupun kuantitas peralatan, perlengkapan dan personel yang ada dalam kerjasama MALSINDO (*Malacca Straits Coordinated Patrol*).
- b. Meningkatkan Kerjasama Militer Indonesia - Singapura
- c. Meningkatkan Latgabma Malindo Darsasa (Latihan Gabungan Bersama Malaysia-Indonesia Samudera dan Angkasa)
- d. Meningkatkan Intensitas Forum *Joint Bilateral Commission Indonesia-Philippines*
- e. Meningkatkan Kerjasama Militer antara Indonesia dan Thailand, Indonesia dan Vietnam, Indonesia dan Brunnai Darussalam, Indonesia dan Kamboja serta Indonesia dan Myanmar.
- f. Menginisiasi dan meningkatkan kerjasama militer dengan negara-negara non ASEAN se-kawasan.

Beberapa kontribusi optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN diantaranya, dapat meminimalisir munculnya mispersepsi antara sesama negara ASEAN, penggunaan kekuatan militer dapat dieliminir, tukar menukar informasi intelijen lebih mudah, kohesifitas asean lebih mudah diwujudkan, pengaruh indonesia yang lebih besar memudahkan mencari solusi berbagai masalah. Adapun kontribusi politik dan keamanan yang mantap terhadap gatra-gatra ketahanan nasional Indonesia dapat dijelaskan dari aspek tri gatra dan panca gatra.

Indikator optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional adalah :

- a. **Meningkatnya** peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN, baik secara kuantitas maupun kualitas.
- b. **Meningkatnya** stabilitas politik dan Keamanan Regional ASEAN
- c. **Meningkatnya** ketahanan nasional Indonesia yang dipengaruhi oleh situasi politik dan keamanan regional.

Dalam upaya untuk optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional, maka kebijakan yang ditempuh adalah **“terwujudnya optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN melalui penetapan batas-batas wilayah negara Indonesia dengan negara-negara tetangga secara tuntas, meningkatkan alokasi anggaran pertahanan secara proporsional, menciptakan kestabilan politik dalam negeri dan meningkatkan kemampuan manajemen bencana alam di kalangan militer ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional”**.

Terkait dengan kebijakan untuk mengoptimalkan peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN guna memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional dalam rangka ketahanan nasional diperlukan 4 (empat) strategi yaitu :

- a. **Strategi-1 : Menyelesaikan Secara Tuntas Masalah Batas Negara Indonesia dengan Negara-negara Tetangga** dengan upaya :
  - 1). Presiden RI melakukan pertemuan Tingkat Tinggi secara intensif kepada seluruh semua Kepala Negara/Pemerintahan negara-negara ASEAN yang isinya khusus membicarakan keinginan menuntaskan batas-batas negara Indonesia dengan negara-negara tetangga.
  - 2). Ketua MPR RI melakukan pembicaraan khusus secara bilateral dengan pimpinan lembaga sejenis di semua negara-negara ASEAN untuk membahas masalah batas-batas negara.
  - 3). Ketua DPR RI melakukan pembicaraan dengan ketua parlemen negara-negara ASEAN yang membahas penuntasan batas-batas negara.
  - 4). Presiden RI menunjuk Duta Besar Keliling yang bertugas melakukan lobby tingkat tinggi guna membicarakan masalah batas negara Indonesia dengan negara-negara tetangga sesama ASEAN.

- 5). Menteri Luar negeri RI melakukan pertemuan-pertemuan secara khusus dengan menteri Luar negeri negara-negara ASEAN guna mencari solusi untuk menuntaskan masalah batas-batas negara Indonesia dengan negara-negara tetangga.
- 6). Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI membentuk tim khusus yang berfungsi sebagai tim asistensi untuk membantu Duta Besar Keliling dalam melaksanakan tugasnya.
- 7). Kemlu RI, Kemdagri, Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kemhan bekerjasama untuk menetapkan kembali patok-patok batas-batas negara RI.
- 8). Kemlu dan Kemkumham membuat berbagai *planning* untuk menyelesaikan masalah batas-batas negara, termasuk skenario membawa ke Mahkamah Internasional, jika pembicaraan bilateral tidak mencapai kesepakatan.
- 9). Kemlu, Kemdagri dan Kemag bekerjasama dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk melakukan sosialisasi tentang batas-batas negara kepada masyarakat yang tinggal di perbatasan.
- 10). Kemdagri dan TNI bekerjasama dalam melakukan sosialisasi tentang bela negara kepada masyarakat, terutama masyarakat pantai atau yang tinggal di wilayah-wilayah terdepan NKRI.
- 11). Kemdagri dan Kementerian PU mengalokasikan anggaran khusus bagi pembangunan wilayah perbatasan

Kemudian, Strategi kedua, yakni **Meningkatkan Alokasi Anggaran Pertahanan Indonesia** dengan upaya :

- 1). Kemhan dan Panglima TNI melakukan evaluasi terhadap renstra dan renop tentang pertahanan yang sudah ada, termasuk menetapkan postur TNI yang ideal berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk RI yang harus dilindungi.
- 2). Kemhan dan DPR RI perlu meninjau kembali alokasi anggaran pertahanan yang ditetapkan dalam APBN dan APBNP.
- 3). Panglima TNI membuat skala prioritas pengembangan pertahanan.



- 4). Panglima TNI mengajak anggota DPR RI untuk mengikuti latihan bersama atau kerjasama militer lainnya di lingkup ASEAN.
- 5). Kemhan dan Panglima TNI membangun komunikasi yang lebih intensif kepada anggota DPR RI untuk mempermudah memberikan pemahaman bahwa peningkatan alokasi anggaran pertahanan sangat penting untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang berwibawa di lingkup ASEAN.
- 6). Panglima TNI melakukan komunikasi intensif dengan kelompok kepentingan yang terkait dengan kebutuhan peralatan dan perlengkapan pertahanan agar ikut meyakinkan anggota DPR RI tentang kebutuhan Indonesia akan pertahanan modern dalam rangka menciptakan ketahanan nasional yang tangguh.
- 7). Panglima TNI bekerjasama dengan Industri Strategis di dalam negeri guna membangun kemandirian dalam memproduksi perlengkapan dan peralatan pertahanan yang dibutuhkan, termasuk untuk perawatannya.
- 8). Kemhan, Panglima TNI dan Kemdikbud melakukan kordinasi untuk membicarakan kemungkinan alokasi biaya pendidikan bagi personel militer yang bersumber dari anggaran pendidikan.

Selanjutnya, strategi ketiga, yaitu **Menciptakan Stabilitas Politik Dalam Negeri** adalah dengan cara :

- 1). Kemdagri dan DPR melakukan evaluasi dan revisi terhadap seluruh UU Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2). Presiden dan DPR perlu meninjau kembali semua UU yang terkait dengan Otonomi Daerah.
- 3). Kemendagri dan DPR RI meninjau kembali UU tentang Partai Politik (Parpol).
- 4). Presiden dan DPR membuat UU yang mengatur tentang kekuasaan pemerintahan pusat yang agar dapat mengontrol secara penuh pemerintahan di daerah dalam bingkai NKRI.

- 5). Kemdagri dan DPR RI mengevaluasi UU yang terkait dengan Organisasi Masyarakat (ormas).
- 6). Aparat penegak hukum (Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan dan Lembaga Kehakiman) yang termasuk dalam *criminal justice system* dalam negara Indonesia, harus menegakkan hukum dengan tegas dan adil.
- 7). Kemkumham dan DPR membuat UU yang memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk melakukan uji materi terhadap semua peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan tanpa terlebih dahulu diminta oleh masyarakat.
- 8). Tokoh agama (Toga) dan Tokoh Masyarakat (Tomas) yang menjadi pemimpin organisasi masyarakat keagamaan dan organisasi masyarakat umum, perlu melakukan sosialisasi tentang wawasan kebangsaan kepada semua anggota atau simpatisan organisasi mereka, agar dapat ikut menciptakan suasana yang kondusif bagi Indonesia di lingkup ASEAN.
- 9). Kemag membentuk forum koordinasi dan kerjasama pengawasan terhadap paham-paham fundamental agama yang berkembang saat ini.
- 10). Kemdagri, Pemprop dan Pemkab/Pemkot yang memiliki wilayah berbatasan langsung dengan negara tetangga melakukan sosialisasi pentingnya wawasan kebangsaan untuk mengeliminir kejahatan lintas negara yang dapat menimbulkan kerawanan di masyarakat perbatasan.

Terakhir, strategi keempat yaitu **Meningkatkan Pemahaman Manajerial Penanggulangan Bencana Alam Di Kalangan Militer ASEAN** dengan upaya :

- 1). Kemhan bekerjasama dengan Badan *Search And Rescue* Nasional (Basarnas) guna mengadakan pelatihan rutin tentang penanggulangan bencana alam dengan melibatkan seluruh komponen matra dalam TNI.

- 2). Kemhan dan Panglima TNI bekerjasama dengan Kemdagri mengadakan pelatihan yang konferehnsif terkait dengan manajemen bencana alam bagi personel TNI.
- 3). Pemerintah, dalam hal ini Kemhan, Kemdagri dan Panglima TNI bersama DPR RI (komisi terkait) membuat UU tentang *Double Track Management* (DTM) untuk menjalankan roda pemerintahan dalam keadaan darurat bencana alam di wilayah NKRI.
- 4). Panglima TNI membuat program rutin terkait dengan pelatihan tentang manajemen penanggulangan bencana alam.
- 5). Panglima TNI membuat aturan agar ada pelajaran manajemen penanggulangan bencana pada setiap level pendidikan di kalangan TNI.
- 6). Panglima TNI memperbanyak rekrutmen personel yang berlatar belakang ilmu-ilmu sosial untuk menangani masalah sosial yang timbul akibat terjadinya bencana alam.
- 7). Panglima TNI mengirimkan personel TNI untuk mempelajari manajemen bencana alam ke berbagai negara.
- 8). Kemhan bekerjasama dengan lembaga sejenis dalam lingkungan negara-negara ASEAN untuk melaksanakan kerjasama dalam bidang manajemen penanggulangan bencana alam.
- 9). Kemhan dan DPR RI membuat UU yang mempertegas posisi teritorial TNI di daerah-daerah.
- 10). Kemhan dan Panglima TNI menginisiasi kekuatan militer negara-negara ASEAN untuk mengadakan pelatihan bersama tentang penanggulangan bencana alam.
- 11). Kemhan dan Panglima TNI menginisiasi kerjasama manajemen penanggulangan bencana alam bagi personel TNI dengan beberapa negara maju yang juga sering mengalami bencana, seperti Jepang, Australia atau AS.
- 12). Kemhan bekerjasama dengan Kemdikbud dan LIPI untuk melakukan riset tentang bencana alam di beberapa wilayah NKRI.

Dari pembahasan yang diangkat dalam TASKAP ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Salah satu faktor untuk mewujudkan ketahanan nasional Indonesia yang tangguh adalah dengan stabilitas politik dan keamanan regional yang mantap di kawasan ASEAN.
- b. Untuk memantapkan stabilitas politik dan keamanan regional, Indonesia perlu meningkatkan atau mengoptimalkan peranannya dalam kerjasama militer sesama negara-negara ASEAN.
- c. Optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer ASEAN terkendala dengan adanya faktor-faktor psikologis, diantaranya masih belum tuntasnya masalah batas-batas wilayah negara Indonesia dengan negara-negara tetangga di lingkup ASEAN.
- d. Optimalisasi peranan Indonesia juga terkendala dengan rendahnya alokasi anggaran pertahanan Indonesia.
- e. Instabilitas politik dalam negeri Indonesia telah berpengaruh pada upaya optimalisasi peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN.
- f. Sebagian besar para diplomat RI selama ini belum memiliki pemahaman nilai-nilai kebangsaan dalam melakukan berbagai perundingan di forum Internasional.
- g. Kunci utama dalam mengoptimalkan peranan Indonesia dalam kerjasama militer negara-negara ASEAN adalah dengan meningkatkan alokasi anggaran pertahanan dan stabilitas politik keamanan dalam negeri.
- h. *Influence* atau pengaruh hanya dapat diperoleh dengan kekuatan nasional yang efektif, terutama kesiapan militer dan kualitas pemerintahan Indonesia dalam pandangan negara-negara ASEAN.

Beberapa saran yang akan disampaikan adalah sebagai berikut :

- 1). Presiden RI perlu memfokuskan menyelesaikan masalah perbatasan negara Indonesia dengan negara-negara tetangga di regional ASEAN dengan target waktu yang disepakati bersama DPR RI.

- 2). Presiden RI perlu memiliki keberpihakan terhadap kepentingan akan kebutuhan alokasi anggaran pertahanan.
- 3). Menteri Pendidikan dan Kebudayaan harus mengevaluasi kurikulum yang terkait dengan tujuan untuk menumbuhkan sikap cinta tanah air, baik melalui pelajaran di intra kulikuler maupun pad aktivitas ekstra kurikuler di semua jenjang pendidikan di Indonesia.
- 4). Menteri Luar Negeri harus mewajibkan apara diplomat dari Kemenlu untuk mengikuti pendidikan tentang wawaan kebangsaan untuk menambah pemahaman mereka dalam mengedapnkan bela negara saat ditugaskan di luar negeri.
- 5). Selain difikirkan oleh Presiden, Panglima TNI perlu memikirkan berbagai cara agar alokasi anggaran pertahanan dapat dinaikkan secara proporsional, misalnya dengan bekerjasama dengan kelompok kepentingan yang ada di dalam negeri.

=====

**Lampiran :**

- 1. Alur Pikir TASKAP**
- 2. Pola Pikir TASSKAP**
- 3. Perbandingan Alokasi Anggran Pertahanan Negara-Negara ASEAN**
- 4. Alokasi Anggran Pertahanan Negara-negara ASEAN per Pendapatan Perkapita.**

## Lampiran 3 :

Tabel Perbandingan Militer Negara ASEAN

No.	Negara	Belanja Militer (dalam US\$)						GDP (dalam miliar US\$)	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah dalam km <sup>2</sup>
		2008	% GDP 2007	2009	% GDP 2008	2010	% GDP 2009			
1	Brunei	336,000,000	2.6	336,000,000	3.9	327,000,000	3.1	13.022	401,890	5,765
2	Filipina	1,342,000,000	0.9	1,424,000,000	0.8	2,439,510,000	0.8	188.719	94,013,200	299,764
3	Indonesia	4,903,000,000	1.2	4,908,000,000	1	4,740,000,000	0.9	706.735	230,472,833	1,904,569
4	Kamboja	-	-	123,000,000	1.1	191,000,000	1.1	11.629	14,805,358	181,040
5	Laos	17,600,000	0.4	21,200,000	0.4	18,400,000	0.4	6.341	6,217,141	236,800
6	Malaysia	4,199,000,000	2.1	4,078,000,000	2	3,500,000,000	2	247.781	27,730,000	330,803
7	Myanmar	-	-	-	-	-	-	42.953	58,840,000	676,578
8	Singapura	7,293,000,000	3.7	7,966,000,000	3.9	9,829,496,000	3.9	222.699	5,076,700	694
9	Thailand	4,115,000,000	1.3	4,908,000,000	1.5	5,200,000,000	1.9	318.850	66,720,153	513,120
10	Vietnam	2,186,000,000	2.5	2,073,000,000	2.4	2,410,000,000	2.5	104.6	90,549,390	331,689

*Sources:*

Anggaran Militer 2008 dan % GDP 2007	: <a href="http://milexdata.sipri.org">http://milexdata.sipri.org</a>
Anggaran Militer 2009 dan % GDP 2008	: <a href="http://military.wikia.com/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures">http://military.wikia.com/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures</a>
Anggaran Militer 2010 dan % GDP 2009	: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures">http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_military_expenditures</a>
GDP, Jumlah Penduduk, dan Luas Wilayah	
Brunei	: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Brunei">http://en.wikipedia.org/wiki/Brunei</a>
Filiphina	: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Filipina">http://en.wikipedia.org/wiki/Filipina</a>
Indonesia	: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia">http://en.wikipedia.org/wiki/Indonesia</a>
Kamboja	: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kamboja">http://en.wikipedia.org/wiki/Kamboja</a>
Laos	: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Laos">http://en.wikipedia.org/wiki/Laos</a>
Malaysia	: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia">http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia</a>
Myanmar	: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar">http://en.wikipedia.org/wiki/Myanmar</a>
Singapura	: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Singapura">http://en.wikipedia.org/wiki/Singapura</a>
Thailand	: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand">http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand</a>
Vietnam	: <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam">http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam</a>

Lampiran 4 :

**Belanja Militer Per Kapita**

No.	Negara	Belanja Militer 2010 (dalam US \$)	Jumlah Penduduk	Belanja Militer Per Kapita (dlm US\$)
1	Brunei	327,000,000	401,890	813.7
2	Filiphina	2,439,510,000	94,013,200	25.9
3	Indonesia	4,740,000,000	230,472,833	20.6
4	Kamboja	191,000,000	14,805,358	12.9
5	Laos	18,400,000	6,217,141	3.0
6	Malaysia	3,500,000,000	27,730,000	126.2
7	Myanmar	-	58,840,000	
8	Singapura	9,829,496,000	5,076,700	1,936.2
9	Thailand	5,200,000,000	66,720,153	77.9
10	Vietnam	2,410,000,000	90,549,390	26.6

**Belanja Militer Per Km<sup>2</sup>**

No.	Negara	Belanja Militer 2010 (dalam US \$)	Luas Wilayah (dlm Km <sup>2</sup> )	Belanja Militer Per Kapita (dlm US\$)
1	Brunei	327,000,000	5,765	56,721.6
2	Filiphina	2,439,510,000	299,764	8,138.1
3	Indonesia	4,740,000,000	1,904,569	2,488.8
4	Kamboja	191,000,000	181,040	1,055.0
5	Laos	18,400,000	236,800	77.7
6	Malaysia	3,500,000,000	330,803	10,580.3
7	Myanmar	-	676,578	
8	Singapura	9,829,496,000	694	14,163,538.9
9	Thailand	5,200,000,000	513,120	10,134.1
10	Vietnam	2,410,000,000	331,689	7,265.8



